



KEDUTAAN BESAR  
REPUBLIK INDONESIA  
TASHKENT

# RENCANA STRATEGIS 2015 -2019

**COPY KBRI TASHKENT**





## KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategik (Renstra) KBRI Tashkent Tahun 2015-2019 merupakan pedoman KBRI Tashkent, sebagai salah satu instansi pemerintah, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang politik dan hubungan luar negeri RI. Selain itu Renstra merupakan salah satu upaya dalam menegakan dan menjalankan “*good governance*”, dan salah satu komponen dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Semangat penyusunan dan penyampaian Renstra ini sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu penyusunan Renstra ini juga mengacu pada RPJMN 2015-2019, Visi dan Misi Pemerintah dan Renstra Kemlu 2015-2019.

Demikian, agar kiranya Renstra KBRI Tashkent ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kerja dan mengukur kinerja KBRI Tashkent serta menjadi media komunikasi dan umpan balik, tidak saja bagi KBRI Tashkent, tetapi juga bagi instansi terkait lainnya dalam upaya meningkatkan kinerja KBRI Tashkent di masa mendatang.

Tashkent, Juni 2015

Kepala Perwakilan RI

Anak Agung Gde Alit Santhika  
Dubes LBBP

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI TASHKENT</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I. KONDISI UMUM DAN ANALISA SWOT</b>	1
I.1      Kondisi Umum	1
I.2      Analisa SWOT	10
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	12
II.1     Visi KBRI Tashkent	12
II.2     Misi KBRI Tashkent	12
II.3     Tujuan KBRI Tashkent	13
II.4     Sasaran Strategis KBRI Tashkent	13
II.5     Formulasi Pengukuran Kinerja KBRI Tashkent	15
<b>BAB III    PENUTUP</b>	18
<b>LAMPIRAN 1.</b> Matriks Arah Kebijakan dan Strategi	
<b>LAMPIRAN 2.</b> Matriks Target Kinerja	
<b>LAMPIRAN 3.</b> Penghitungan Indeks Peran Perwakilan RI	
<b>LAMPIRAN 4.</b> Penghitungan Indeks Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama Internasional	

# BAB I

## KONDISI UMUM DAN ANALISIS SWOT

### I. 1. Kondisi Umum

Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia Tashkent mencakup dua negara pecahan Uni Soviet, Uzbekistan dan Kyrgyzstan, yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1991.

[REDACTED]

[REDACTED]

Pada pemilihan parlemen tanggal 21 Desember 2014, partai *Liberal Democratic Party*, partai pengusung Presiden Karimov, berhasil memperoleh kursi terbanyak yaitu 52 dari 150 kursi di parlemen (135 dipilih melalui pemilu dan 15 perwakilan gerakan lingkungan hidup diangkat). Di tempat kedua Partai Demokrasi Kebangkitan Nasional (*Milliy Tiklanish*) 36 kursi, diikuti Partai Demokrasi Kerakyatan 27 kursi dan Partai Sosial Demokrat "ADOLAT" 20 kursi. Sedangkan dalam pemilihan Presiden tanggal 29 Maret 2015, Islam Karimov berhasil meraih suara 90,9%, Akmal Saidov (Partai Demokrat "*Milliy Tiklinish*") meraih 3,08%, Hotamjo Ketmonov (Partai Demokrasi Kerakyatan) meraih 2,92% dan Narimon Umrov (Partai Sosial Demokrat "ADOLAT") meraih 2,05%. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada tokoh lainnya yang dapat menandingi karisma Islam Karimov.

Pada tahun 2014 perekonomian Uzbekistan telah memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dan berkesinambungan dengan GDP tumbuh sebesar 8,1% menjadi US\$ 56,8 milyar dari US\$ 51,18 milyar tahun 2013. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan output pada bidang industri sebesar 8,1%, bidang pelayanan/jasa 14,2%, dan pertanian 6,9%. Laju inflasi dijaga pada kisaran 6,1%. Volume investasi ke Uzbekistan tahun 2014 meningkat 10,9% dan mencapai nilai US\$ 14,6 milyar. Dari jumlah tersebut, 75% merupakan investasi asing langsung (FDI). Sebanyak 73% dari investasi yang diperoleh dialirkan untuk pembangunan dan modernisasi fasilitas produksi.

Prioritas pembangunan tahun 2015 yang ditetapkan oleh Pemerintah Uzbekistan adalah meningkatkan ekspor dan mempromosikan produk-produknya di pasar luar negeri, mengembangkan industri-industri dan kapasitas produksi yang memiliki daya saing tinggi di pasar eksternal serta modernisasi ekonomi. Selain itu pemerintah Uzbekistan juga akan mengembangkan dan meningkatkan *local content* produksi dan kerjasama antar-industri. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan produk impor.

Produk ekspor utama Uzbekistan adalah: kapas (15%), mobil (15%), *refined cooper* (9,3%), *non-retail* benang kapas murni (6,6%), dan produk kimia (6,2%) sementara Uzbekistan mayoritas mengimpor suku cadang kendaraan (8,1%), obat-obatan (4,4%), *sawn wood* (3,1%), *crude petroleum* (3,0%), dan *refined petroleum* (3,0%). Sedangkan 5 negara utama tujuan ekspor Uzbekistan adalah: Rusia (28%), China (22%), Turki (17%), Kazakhstan (16%), dan Perancis (3,3%) sementara 5 negara sumber impor Uzbekistan adalah Rusia (22%), Korea Selatan (17%), China (17%), Kazakhstan (13%), dan Jerman (4,8%).

Dalam hubungan luar negeri, kebijakan Uzbekistan adalah tidak akan bergabung dalam blok politik/militer apapun. Uzbekistan memandang PBB sebagai satu-satunya organisasi universal dalam hal menjaga keamanan dan stabilitas global dan untuk mencari solusi terhadap masalah internasional yang mendesak. Kebijakan luar negeri ini ditegaskan kembali oleh Presiden Karimov pada saat pelantikannya di depan Sidang gabungan parlemen Uzbekistan tanggal 10 April 2015.

Uzbekistan menempatkan hubungan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tengah sebagai prioritas utama, yang diikuti oleh hubungan dengan negara-negara *Commonwealth of Independent States* (CIS), dan negara-negara *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), negara-negara besar seperti Rusia, China, Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, serta negara lain dengan kepentingan sama dengan Uzbekistan dalam organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya. Dalam kaitan hubungan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tengah terdapat beberapa isu yang menjadi sorotan terutama dengan Kyrgyzstan dan Tajikistan, yaitu konflik perbatasan, energi, dan penggunaan sumber air sungai trans-nasional.

**Kyrgyzstan**, mengalami perubahan besar ketika revolusi rakyat pada April 2010 yang menggulingkan Presiden Kurmanbek Bakiyev yang kemudian diganti oleh Roza Otunbayeva (Anggota Parlemen dan mantan Menlu) sebagai Kepala Pemerintah Interim Kyrgyzstan.

Roza Otunbayeva selanjutnya mengumumkan penetapan Pemerintahan Interim di Kyrgyzstan hingga terpilihnya pemerintahan dan parlemen baru. Sebagai hasil Pemilihan Umum pada bulan Oktober 2011, Almazbek Atambayev terpilih sebagai Presiden Kyrgyzstan dengan perolehan suara mayoritas 62,52% yang kemudian dilantik pada bulan Desember 2011.

Situasi politik Kyrgyzstan diwarnai dengan seringnya pergantian Perdana Menteri. Pada tanggal 4 April 2014, Joomart Kaipovich Otobayev menggantikan Jantoro Satybaldiyev sebagai Perdana Meteri Kyrgyzstan. Hanya berselang setahun, pada tanggal 23 April 2015

PM Otorbayev mengundurkan diri berkaitan dengan permasalahan tambang emas *Kumtor*.

[REDACTED]

Setelah pengunduran PM Otorbayev, pada tanggal 30 April 2015 parlemen Kyrgyzstan mengesahkan Temir Sariiev sebagai Perdana Menteri. Beberapa tugas penting pemerintahan baru pimpinan PM Temir Sariiev adalah mempersiapkan pemilihan parlemen pada akhir tahun 2015 dan memuluskan masuknya Kyrgyzstan sebagai anggota *Eurasia Economic Union*.

Diantara negara-negara Asia Tengah, Kyrgyzstan merupakan negara yang paling liberal dalam menjalankan sistem perekonomiannya. Negara tersebut telah masuk menjadi anggota WTO sejak tahun 1998. Sektor utama perekonomian Kyrgyzstan adalah pertanian (sayuran, buah-buahan, gandum, dan tembakau), industri makanan (dengan produk utama hasil pertanian dan daging), tekstil (dengan bahan dasar kulit, kapas dan sutera), energi (khususnya *hydro-energy*), pertambangan (khususnya emas dan batu bara), dan perindustrian (memproduksi mesin-mesin kecil).

Pertumbuhan GDP Kyrgyzstan pada akhir tahun 2014 berada pada kisaran 3,6% dengan volume US\$ 6,6 milyar menurun dari GDP tahun 2013 sebesar US\$ 7,23 miliar. Penurunan nilai volume tersebut disebabkan menurunnya hasil produksi tambang emas Kumtor di tahun 2014. Sementara itu, pada akhir tahun 2014 tercatat tingkat inflasi di Kyrgyzstan adalah 10,5%.

Selain memiliki nominal GDP terendah di Asia Tengah, Kyrgyzstan memiliki pendapatan perkapita kedua terendah di Asia Tengah, yakni US\$ 1.263 (World Bank 2003) sedikit di atas Tajikistan dengan jumlah penduduk 5,6 juta. Kondisi perekonomian di Kyrgyzstan tersebut menjadi *push factor* bagi banyaknya warga Kyrgyzstan yang bekerja sebagai *migrant workers* terutama di Rusia yang menurut data resmi mencapai lebih dari 500 ribu jiwa sementara angka sebenarnya diperkirakan mencapai tiga kali lebih besar. *Remittances* yang mereka hasilkan mencapai hampir 29% dari GDP nasional sehingga menjadikan Kyrgyzstan sebagai negara peringkat ketiga di dunia yang tergantung pada pemasukan dari *migrant workers*nya di luar negeri.

[REDACTED]

[REDACTED]

Kyrgyzstan berupaya menjalankan politik luar negeri *multi vector* melalui hubungan baik dengan negara tetangga terutama Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan dan negara-negara besar seperti China, Rusia dan Amerika Serikat meski tetap mengutamakan kepentingan nasional dan mempertahankan hubungan yang seimbang dengan semua negara. Realisasi politik luar negeri Kyrgyzstan diprioritaskan pada upaya memperkuat stabilitas dan keamanan di kawasan, membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga serta intensifikasi proses integrasi di Asia Tengah, membantu memperkuat CIS, meningkatkan potensi politik dan ekonomi dengan negara-negara persemakmuran. Politik luar negeri Kyrgyzstan dewasa ini tidak berubah sebagaimana sebelum revolusi 2010.

Pada lingkup kerjasama regional-internasional, Kyrgyzstan menjalin kerjasama dengan berbagai forum seperti *Commonwealth of Independence States* (CIS), *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), *Collective Security Treaty Organization* (CSTO), *Organization of Islamic Countries* (OIC) dan PBB.

[REDACTED]

### **Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan**

Pemerintah RI mengakui kemerdekaan Republik Uzbekistan pada 28 Desember 1991 dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik kedua negara mulai tanggal 23 Juni 1992. Pada bulan Mei 1994 Indonesia membuka Kedutaan Besar di Tashkent dan pada bulan Desember 1996 Kedutaan Besar Uzbekistan dibuka di Jakarta. Pada bulan Juni 1992 Presiden Uzbekistan Islam Karimov melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia disusul kunjungan balasan Presiden Soeharto ke Uzbekistan pada bulan April 1995.

Hubungan bilateral Indonesia-Uzbekistan di bidang politik berjalan cukup baik dan tidak terdapat masalah-masalah yang mengganggu. Sikap Uzbekistan terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di tanah air bersifat netral dan memandang masalah-masalah yang terjadi di dalam negeri Indonesia sebagai urusan dalam negeri Indonesia. Hingga saat ini, kedua negara telah menandatangani 16 dokumen perjanjian, antara lain Persetujuan Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (1992), Persetujuan Angkutan Udara (1995), Pembentukan Komite Konsultasi Bilateral (2005), Persetujuan Perdagangan (2008), MoU Pelatihan Diplomatik (2008), dan Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral (2008).

Di forum internasional, hubungan kerjasama kedua negara ditandai dengan sikap saling dukung atas pencalonan kandidat dari kedua negara. Dukungan Pemerintah Uzbekistan terhadap pencalonan Indonesia di fora internasional dalam kurun waktu tahun 2013-2014 antara lain keanggotaan Indonesia pada Dewan *International Civil Aviation Organization* (ICAO) bagian III untuk periode 2013-2016, Anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2015-2017 saat Sidang Majelis Umum PBB ke-69 tahun 2014, Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk periode 2019-2020 saat pemilihan pada SMU PBB ke-73 pada tahun 2018, dukungan pada Dubes Hazairin Pohan sebagai asisten Sekjen OKI periode 2014-2019 dan pencalonan Indonesia pada *Council of International Telecommunications Union (ITU)* untuk region Asia. Sebaliknya Indonesia memberikan dukungan atas pencalonan kota Samarkand, Uzbekistan sebagai tuan rumah penyelenggaraan the 99<sup>th</sup> Session of UNWTO Executive Council pada tanggal 1-4 Oktober 2014.

Dalam upaya meningkatkan dan memperluas hubungan kerjasama antara Indonesia dan Uzbekistan, kedua negara telah melaksanakan satu kali Sidang Komisi Bersama (SKB) di Jakarta pada bulan Februari 2009, selain enam kali pertemuan Komite Konsultasi Bilateral (KKB) pada level Deputy Minister/Direktur Jenderal, dimana KKB VI dilaksanakan di Jakarta 11-12 Maret 2015. Saat pertemuan Komisi Kerjasama Bilateral (KKB) VI tersebut, pihak Indonesia menyampaikan enam rancangan MoU kepada pihak Uzbekistan yaitu:

- a. *Draft MoU on Energy and Mineral Resources Cooperation;*
- b. *Draft MoU on Cooperation in Education;*
- c. *Draft MoU on Cooperation in the Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering and Financing Terrorism;*
- d. *Draft MoU on Cooperation in Higher Education;*
- e. *Draft MoU on Cultural Cooperation;* dan
- f. *Draft Agreement on Visa Exemption for Diplomatic Passport Holders.*

Selain itu Pemerintah Indonesia/BNPT dan *National Security Service* Uzbekistan (NSS) saat ini sedang memfinalisasi MoU Kerjasama Penanggulangan Terorisme. Pada tanggal 4 Februari 2015 telah dilaksanakan pertemuan antara BNPT dengan NSS di Tashkent. Untuk pembahasan selanjutnya menurut rencana akan dilaksanakan di Indonesia.

Dalam hal saling kunjung antar pejabat tinggi kedua negara selama kurun waktu 2010 s/d 2015, kunjungan pejabat tinggi dari Uzbekistan ke Indonesia masih belum seimbang dibandingkan kunjungan dari pejabat tinggi Indonesia. [REDACTED]

Adapun saling kunjung dari kedua negara yang tercatat antara lain:

- Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Armida S. Alisjahbana dalam rangka menghadiri *the 43<sup>rd</sup> Asian Development Bank Annual Meeting* (Mei 2010),
- Khokim Samarqand Akbar Shukurov dalam rangka penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Kemitraan antar Kota Banda Aceh dan Samarqand (Mei 2011),
- Wakil Ketua MPR-RI Lukman Hakim Saifuddin (Agustus 2010),
- Dirjen Aspasaf Kemlu RI Hamzah Thayeb dalam rangka pertemuan KKB ke-V (September 2010),
- Ketua Panitia Hubungan Antar Lembaga DPD-RI Sultan Bakhtiar Najamudin (Juli 2011),
- Delegasi BKSAP DPR-RI pimpinan Surahman Hidayat dan Komisi I DPR-RI dibawah pimpinan Ramadhan Pohan (Mei 2013),



- Wakil Menlu Uzbekistan Murad Askarov dalam rangka Sidang KKB ke-VI (Maret 2014),
- Delegasi Kementerian Pariwisata RI yang dipimpin Wamen Sapta Nirwandar dalam rangka Sidang *the 99<sup>th</sup> Session of UNWTO Executive Council* (Oktober 2014),
- Delegasi DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon berkunjung ke Uzbekistan sebagai *observer* pemilu parlemen Uzbekistan atas undangan pemerintah Uzbekistan. Pada kunjungan tersebut, delegasi juga bertemu dengan Wakil Menlu Uzbekistan dan Wakil Ketua Senat serta Wakil Ketua *Legislative Chamber* Uzbekistan (Desember 2014),
- Ketua MK bertemu dengan mitranya Ketua MK Uzbekistan, dalam rangka persiapan Kongres Asosiasi MK Se-Asia yang akan dilaksanakan di Indonesia tahun 2016 (25-27 Maret),
- Delegasi BNPT membicarakan MoU kerjasama anti terorisme dengan *National Security Service Uzbekistan* (NSS), (4 Februari 2015),
- Delegasi DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebagai *observer* pemilihan Presiden (28-31 Maret 2015),
- Delegasi Kemendag untuk membicarakan penyelesaian hambatan implementasi Persetujuan Perdagangan, khususnya mengenai fasilitas *Most Favour Nation* (10-11 April 2015),
- Delegasi Wakil Ketua MPR Mahyudin guna bertemu dengan Wakil Ketua *Legislatif Chamber* Parlemen Uzbekistan (23-25 April 2015),
- Delegasi Ketua DPD Imam Gusman (21-23 Mei 2015) bertemu dengan Ketua Senat Parlemen Uzbekistan.

Sedangkan kerjasama di bidang ekonomi, khususnya perdagangan Indonesia-Uzbekistan pada periode 2010 sampai 2014 cenderung berfluktuasi seperti terlihat pada tabel berikut:

	2010	2011	2012	2013	2014
Indonesia (Ekspor)	3,05	12,91	8,86	9,55	8,78
Indonesia (Impor)	6,47	2,18	0,31	24,04	4,78
Neraca Perdagangan	-3,41	10,72	8,54	-14,49	3,98
Total Perdagangan	9,53	15,10	9,18	33,6	13,56

(Dalam juta USD)

Produk Indonesia yang diekspor ke Uzbekistan antara lain teh, kopi, furniture, komponen *refrigerator*, *polyethylene* (bahan plastik), produk makanan, suku cadang kendaraan, ban mobil, produk elektronik dan komputer, kabel listrik, alas kaki, dan tekstil. Sementara itu, produk Uzbekistan yang diimpor Indonesia antara lain serat kapas, spare part kendaraan, bahan kimia dan pupuk.

Dalam rangka upaya meningkatkan perdagangan Indonesia-Uzbekistan, telah berhasil dilaksanakan "Technical Expert Meeting" tanggal 10-11 April 2015 untuk membahas implementasi Persetujuan Perdagangan tahun 2008 yang selama ini terkendala perbedaan *form certificate of origin*.

Untuk sektor investasi, perusahaan Indonesia telah melakukan investasi di Uzbekistan, antara lain di bidang perhotelan (*Hotel Le Grande Plaza* dengan nilai investasi senilai US\$ 38 juta), komunikasi (*Uzi Telecom*, *joint venture* antara *Bakrie Telecommunication* dengan *Uzbek Telecom* senilai US\$ 58 ribu), dan produksi tekstil (*Indorama Kokand Textile* senilai

US\$ 160 juta) oleh PT. Indorama Tbk melalui anak perusahaannya di Singapura. Sementara itu, Uzbekistan juga telah melakukan investasi di Indonesia, antara lain melalui PT. Kaltrans Resources (perusahaan tambang batubara yang didirikan tahun 2004) senilai US\$ 50 juta dan kerja sama perusahaan Uzbekistan *Andijan* dengan mitranya di Bali mendirikan agen perjalanan dengan investasi US\$ 250 ribu yang beroperasi sejak 2010.

Di sektor pariwisata, jumlah wisatawan Uzbekistan yang mengunjungi Indonesia pada tahun 2013 (berdasarkan jumlah visa yang dikeluarkan KBRI) berjumlah sebanyak 1.471 turis (meningkat 33 persen dari tahun 2012 yaitu 1.103 orang). Sementara di tahun 2014, tercatat 1.268.

Untuk meningkatkan saling pengertian antara kedua bangsa, Indonesia juga telah memberikan beasiswa kepada para mahasiswa Uzbekistan untuk mengikuti program Darmasiswa untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia di berbagai perguruan tinggi di beberapa daerah di Indonesia. Pada periode tahun 2005-2014, terdapat lebih dari 100 pelajar Uzbekistan yang mendapatkan beasiswa Darmasiswa; dan pada periode 2011-2014 terdapat 19 pelajar Uzbekistan yang mendapatkan beasiswa Kerjasama antar Negara Berkembang.

Selain itu telah terdapat perguruan tinggi di Uzbekistan yang telah mengajarkan bahasa Indonesia, yakni *Tashkent University of World Languages* (TSUWL) dan *Tashkent Institute of Oriental Studies* (TIOS). Ini merupakan suatu lompatan besar dalam penguatan kerja sama sosial-budaya dan *people-to-people contact* dengan Uzbekistan. Kerjasama antar perguruan tinggi juga telah berlangsung dengan baik yang ditunjukkan dengan kerjasama Universitas Gunadarma dengan *Russian University of Economics Tashkent Branch*. Saat ini 3 (tiga) mahasiswa dari Russian University of Economics sedang mengikuti pendidikan di Universitas Gunadarma.

Penguatan hubungan antar masyarakat kedua negara juga dilakukan melalui pembentukan *Uzbekistan-Indonesia Friendship Association* yang merupakan bagian dari *Council of Friendship and Cultural Enlightenment Relations with Foreign Countries of Uzbekistan*, pemeliharaan kerjasama dengan organisasi pemuda Uzbekistan 'Kamolot', serta pembinaan hubungan dengan federasi-federasi olahraga di Uzbekistan. Terkait dengan ini, KBRI telah membangun hubungan erat dengan Asosiasi Pencak Silat Uzbekistan, satu cabang bela diri asal Indonesia yang berkembang pesat di Uzbekistan sejak diperkenalkan pada tahun 2007, yang saat ini telah memiliki anggota lebih dari 5 ribu orang.

Interaksi kedua negara khususnya di bidang olahraga cukup intensif. Sejauh ini KBRI mencatat sejumlah tim Indonesia yang berpartisipasi pada pertandingan-pertandingan olahraga internasional di Uzbekistan, antara lain: *International Chess Tournament, Rhythmic Gymnastic World Cup, Asian Karate Federation Senior Championship, Asian Youth Weightlifting Tournament, Asian Sambo ((Central Asian traditional Wrestling) Tournament, Asian Canoe Championship, International Tournament of Pencak Silat, Senior World Wrestling Championship*. Selain itu, Tim Polo Air Indonesia juga melakukan latihan dan kompetisi persahabatan di Uzbekistan dalam persiapan menghadapi SEA Games.

## Hubungan Bilateral Indonesia-Kyrgyzstan

Hubungan bilateral Indonesia-Kyrgyzstan dimulai dengan pengakuan Indonesia terhadap kemerdekaan Kyrgyzstan pada tanggal 28 Desember 1991. Hubungan diplomatik RI-Kyrgyzstan ditandai dengan ditandatanganinya *Joint Communiqué on Establishment of Diplomatic Relations between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Kyrgyzstan* pada tanggal 5 April 1993 di Moskow. Wilayah akreditasi Kyrgyzstan dirangkap oleh KBRI Tashkent sejak Mei 1994.

Kedua negara telah memiliki kerjasama antar-parlemen melalui Kelompok Kerja Bilateral yang dimulai dengan penandatanganan Protokol Kerjasama antara DPR RI dan Parlemen Kyrgyzstan pada tanggal 17 Mei 1996, dan diperkuat lagi dengan ditandatanganinya MoU Kerjasama antara DPR RI dengan Parlemen Kyrgyzstan dalam kunjungan Ketua Parlemen Kyrgyzstan ke Indonesia pada tanggal 12-14 Juli 2011. Kedua Negara juga sudah memiliki *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kyrgyz Republic on Bilateral Consultations*. Namun sampai saat ini Forum Konsultasi Bilateral dimaksud belum pernah terlaksana. Selain itu kedua negara juga telah memiliki perjanjian bilateral di bidang Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (1995), Persetujuan Angkutan Udara (1995), Pariwisata (1995), Pembentukan Konsultasi Bilateral (2011), dan Persetujuan Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (2011).

Di forum internasional kedua negara menjalin kerjasama erat dengan saling mendukung berdasarkan azas resiprositas posisi masing-masing di forum regional dan internasional. Diantaranya, Pemerintah Kyrgyzstan telah memberikan dukungannya pada pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014, pencalonan Indonesia pada keanggotaan *United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)* periode 2012-2014, pencalonan Indonesia sebagai anggota *Executive Board UNESCO* periode 2012-2015, pencalonan Ambassador Nugroho Wisnumurti sebagai Anggota *International Law Commission (ILC)* periode 2012-2016 dan *the Council of International Telecommunications Union (ITU)* periode 2014-2018. Sementara Indonesia memberikan dukungan bagi pencalonan Kyrgyzstan pada *UN Economic and Social Council* periode 2013-2015 dan usulan proyek Kyrgyzstan "*Dialogue of cultures as a way of rapproachment of civilizations in XXI century*" pada *UNESCO Participation Programme* tahun 2012-2013. Saat ini Indonesia menunggu dukungan dari Pemerintah Kyrgyzstan untuk pencalonan kembali Ambassador Nugroho Wisnumurti sebagai Anggota *International Law Commission (ILC)* periode 2017-2021.

Dalam hal saling kunjung, kunjungan pejabat Kyrgyzstan ke Indonesia dalam periode 2010-2015, yaitu: kehadiran Deputy Menlu Nurlan Aitmurzaev pada *Bali Democratic Forum (BDF)* Desember 2010, dan dalam menghadiri KTM GNB di Bali Mei 2011; kunjungan Ketua Parlemen Kyrgyzstan Akhmatbek Keldibekov ke Indonesia Juli 2011; Asisten Menteri Kanatbek Karybai hadir pada Konferensi *the 5th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR)* di Yogyakarta Oktober 2012; Menteri Kebudayaan, Penerangan dan Pariwisata Kyrgyzstan, Sultan Rayev menghadiri Forum Kebudayaan Dunia bertema "Kekuatan Budaya dalam Pembangunan Berkelanjutan" yang digelar di Bali, tanggal 24-27 November 2013. Dalam kaitannya dengan pertemuan peringatan 60 tahun KAA tahun 2015,

seorang anggota parlemen Kyrgyzstan memenuhi undangan DPR RI untuk berpartisipasi pada pertemuan parlemen Asia-Afrika. Sedangkan Wakil Menlunya berpartisipasi pada *Commemorative Summit* KAA. Sebaliknya pejabat RI ke Kyrgyzstan adalah kunjungan Wakil Ketua DPR RI H.M. Anis Matta, November 2012; delegasi DPR-RI pimpinan Dody Alex Nurdin dalam rangka menghadiri *International Conference on the Role of Parliament in Advancing Public Policy against Corruption*, Juni 2014.

Sedangkan hubungan di bidang ekonomi, khususnya perdagangan Indonesia-Kyrgyzstan juga cenderung berfluktuasi dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, seperti terlihat pada tabel berikut:

	2010	2011	2012	2013	2014
Indonesia (Ekspor)	1,41	2,49	2,77	0,85	0,89
Indonesia (Impor)	3,03	1,43	1,46	1,38	0,68
Neraca Perdagangan	-1,62	1,06	1,3	-0,52	0,2
Total Perdagangan	4,45	3,93	4,24	2,23	1,58

(Dalam juta USD)

Produk Indonesia yang diekspor ke Kyrgyzstan antara lain furnitur, teh, kopi, minyak kelapa sawit, kopra, produk makanan, elektronik/komputer, kertas, dan ban mobil. Sementara itu, produk Kyrgyzstan yang diimpor Indonesia antara lain kapas, tembakau, lembaran aluminium, *polymer (polyurethane)*, kabel tembaga, mineral, dan mesin skala kecil.

Di bidang sosial budaya dan pendidikan, Kyrgyzstan juga telah memanfaatkan tawaran Indonesia untuk mengikuti beasiswa Darmasiswa, namun sifatnya masih terbatas. Sampai saat ini tercatat hanya 3 orang Kyrgyzstan yang telah mengikuti program Darmasiswa. Di bidang pendidikan juga telah terdapat kerjasama antar perguruan tinggi, yakni antara *Kyrgyz National University* (KNU) dan Universitas Gunadarma, Indonesia sejak tahun 2013.

Sebagai upaya untuk makin meningkatkan hubungan bilateral RI-Kyrgyzstan di bidang ekonomi dan konsuleran, Pemerintah Indonesia telah mengangkat Mr. Eduard Kubatov selaku Konsul Kehormatan RI di Bishkek sejak Februari 2014. Selama kurang lebih 1 tahun semenjak secara resmi diangkat menjadi Konsul kehormatan, yang bersangkutan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam melindungi dan membantu memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam kaitannya dengan Kyrgyzstan.

### **Proyeksi Hubungan Bilateral dengan Uzbekistan dan Kyrgyzstan**

Uzbekistan dengan jumlah penduduk 31 juta jiwa dan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dalam 3 tahun terakhir, merupakan pasar yang prospektif bagi produk-produk Indonesia. Sementara Kyrgyzstan dengan perekonomiannya yang cukup liberal dan telah masuk kedalam *Eurasia Economic Union* yang beranggotakan Rusia, Kazakhstan, Belarus dan Armenia dapat menjadi non-tradisional yang potensial, walaupun saat ini volume perdagangan Indonesia dengan Kyrgyzstan masih sangat kecil.

Potensi investasi yang dapat dimanfaatkan di Uzbekistan antara lain di bidang pengembangan infrastruktur transportasi, industri otomotif, pengolahan hasil pertanian,

manufaktur mesin dan energi. Sementara potensi investasi yang dapat dimanfaatkan di Kyrgyzstan antara lain di bidang pertambangan, pengolahan hasil pertanian, IT dan komunikasi serta sektor jasa.

Di sektor energi, cadangan migas yang relatif besar yang dimiliki Uzbekistan dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menjalin kerjasama di bidang ini. Sementara itu, meskipun Kyrgyzstan tidak memiliki cadangan migas yang berlimpah, negara tersebut memiliki potensi pengembangan energi baru dan terbarukan yang sangat besar. Peningkatan kerjasama energi dengan Uzbekistan dan Kyrgyzstan akan membantu mencapai tujuan ketahanan energi Indonesia.

Di bidang sosial-budaya, terdapatnya dua perguruan tinggi di Uzbekistan yang mengajarkan Bahasa Indonesia dapat menjadi landasan penguatan kerjasama sosial-budaya dan *people-to-people contact* dengan Uzbekistan.

Penguatan kerjasama teknik dinilai akan semakin memperkuat hubungan dan kerjasama Indonesia dengan Uzbekistan dan Kyrgyzstan. Sejumlah bidang kerjasama teknik yang dapat diperkuat antara lain: *public administration reform and good governance*, pengembangan industri pariwisata dan kerjasama teknik di bidang pengelolaan bantuan asing.

## I. 2. Analisa SWOT

Kondisi KBRI Tashkent dalam mewujudkan tugas dan fungsi dalam menjalankan politik dan hubungan luar negeri serta diplomasi di wilayah akreditasi dapat digambarkan dalam bentuk SWOT yang disajikan dalam bentuk format matriks sebagai berikut:

<b>Strengths (Kekuatan)</b>	<b>Weaknesses (Kelemahan)</b>
1. SDM Perwakilan yang mencukupi 2. Sarana dan prasarana yang memadai 3. Dukungan staf setempat yang memiliki kompetensi dalam mencari peluang dan menjalin hubungan dengan <i>counterpart</i> di Uzbekistan dan Kyrgyzstan	1. Keterbatasan alokasi anggaran kegiatan; [REDACTED] [REDACTED] 3. Pengalokasian anggaran dari sumber PNBP untuk sebagian belanja barang;
<b>Opportunities (Kesempatan)</b>	<b>Threats (Tantangan)</b>
1. Uzbekistan dan Kyrgyzstan berada di persimpangan ( <i>crossroad</i> ) wilayah Asia Tengah menjanjikan peluang kerjasama investasi, ekonomi dan perdagangan. Investor di Uzbekistan dan Kyrgyzstan akan memperoleh akses ke pasar CIS dengan lebih dari 300 juta penduduk;	1. Perbedaan sistem dan peraturan dengan negara akreditasi; [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 4. Kondisi kedua negara akreditasi yang <i>landlocked</i> ; 5. Situasi keamanan di perbatasan yang

<p>2. Kedekatan hubungan historis;</p> <p>3. Adanya kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang memadai;</p> <p>4. Adanya perguruan tinggi di Uzbekistan yang mengajarkan Bahasa Indonesia;</p> <p>5. Terdapat potensi investasi yang dapat dimanfaatkan Indonesia antara lain di bidang pengembangan infrastruktur transportasi, industri otomotif, pengolahan pertanian, manufaktur mesin dan energi.</p>	<p>masih memerlukan perhatian khusus.</p> <p>[REDACTED]</p>
---	---

**COPY KBRI TASHKENT**

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### II. 1. Visi KBRI Tashkent

Sebagai salah satu perwakilan RI diluar negeri, KBRI Tashkent merupakan bagian dari ujung tombak pelaksanaan diplomasi Indonesia. Dengan predikat tersebut, dalam pelaksanaan tugas, KBRI Tashkent harus selalu berorientasi dan sejalan dengan kebijakan Kementerian Luar Negeri selaku penanggung jawab hubungan luar negeri.

Visi KBRI Tashkent disusun mengacu kepada visi Kementerian Luar Negeri RI dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi, latar belakang serta perkembangan keadaan yang ada di wilayah akreditasi (Uzbekistan dan Kyrgyzstan). Visi KBRI Tashkent adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya pemajuan kepentingan nasional Indonesia di Uzbekistan dan Kyrgyzstan dengan KBRI Tashkent sebagai ujung tombak”**

**Pemajuan** berarti upaya/perbuatan memajukan. Hal ini menggambarkan tujuan untuk meningkatkan atau membawa kepada keadaan yang lebih baik. Dalam konteks hubungan dengan negara akreditasi, diwujudkan dengan upaya peningkatan hubungan dan kerjasama.

**Kepentingan nasional Indonesia** merupakan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk periode 2015-2019, kepentingan Indonesia difokuskan pada upaya menciptakan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

**KBRI Tashkent sebagai ujung tombak** menggambarkan peranan dalam posisi terdepan dalam rangkaian instrumen dan cara diplomasi dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, dengan memanfaatkan seluruh kekuatan

Pernyataan visi tersebut menggambarkan komitmen yang akan diperjuangkan dan diwujudkan oleh KBRI Tashkent terutama melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perwakilan diplomatik RI di wilayah akreditasi, Uzbekistan dan Kyrgyzstan. Pernyataan visi KBRI Tashkent sejalan dengan visi Kementerian Luar Negeri RI sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemlu 2015-2019 yang menyiratkan pentingnya pelaksanaan diplomasi total sebagai strategi untuk mewujudkan visi nasional yaitu Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

### II 2. Misi KBRI Tashkent

Berdasarkan pernyataan visi diatas, KBRI Tashkent menetapkan 2 (dua) misi untuk kurun waktu 2015 – 2019, sebagai pedoman dalam upaya mencapai visi tersebut, yaitu:

### MISI 1:

Memperkuat peran KBRI Tashkent dalam memperjuangkan kepentingan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan di negara

**Berbagai bidang** merupakan cakupan sektor yang menjadi fokus pelaksanaan tugas KBRI Tashkent meliputi antara lain bidang kerjasama politik, ekonomi, sosial-budaya, pelayanan publik dan perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia.

**Memperjuangkan** adalah melakukan usaha untuk meraih sesuatu.

**Kepentingan nasional** pemenuhan tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka hubungan kerjasama yang dilakukan dengan negara akreditasi sesuai dengan amanat yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencapai Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

### MISI 2:

Meningkatkan kapasitas perwakilan RI yang mumpuni dalam mendukung misi diplomasi di negara akreditasi

**Meningkatkan** adalah memperkuat, mengukuhkan

**Kapasitas** menggambarkan kemampuan atau daya upaya

**Mumpuni** adalah mampu melaksanakan tugas dengan baik; menguasai keahlian (kecakapan, keterampilan) tinggi.

**Diplomasi** adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain; urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negeri lain

**Profesional** merupakan sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi berupa tuntutan bagi seseorang yang sedang mengemban amanahnya agar mendapatkan proses dan hasil yang optimal; merupakan bagian dari proses, fokus kepada output, dan berorientasi ke pelayanan.

## II. 3. Tujuan KBRI Tashkent

### 1. Peran KBRI Tashkent yang berpengaruh dalam hubungan bilateral dengan Uzbekistan dan Kyrgyzstan.

**Peran**, adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

**Berpengaruh**, adalah mempunyai pengaruh terhadap pengambil kebijakan isu-isu bilateral.

**Hubungan bilateral**, adalah hubungan yang melibatkan dua belah pihak.



Tujuan ini diukur melalui indikator yang disertai dengan target sampai dengan 2019 melalui peningkatan hubungan bilateral dan peran Indonesia di organisasi internasional. Target dari tujuan ini sebagaimana tabel di bawah.

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Target 2019
Peran Perwakilan RI yang berpengaruh dalam hubungan bilateral dengan Uzbekistan dan Kyrgyzstan	Indeks peran Perwakilan RI	87,5%	91,3%

## 2. Kapasitas KBRI Tashkent yang mumpuni

**Kapasitas**, adalah kemampuan yang dimiliki.

**Mumpuni**, adalah mempunyai pengaruh terhadap pengambil kebijakan isu-isu bilateral.

Tujuan ini diukur melalui indikator yang disertai dengan target sampai dengan 2019 melalui peningkatan kapasitas Perwakilan RI dalam rangka pelaksanaan diplomasi dan kerja sama internasional. Target dari tujuan ini sebagaimana tabel di bawah.

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2015	Target 2019
Kapasitas KBRI Tashkent yang mumpuni	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan Itjen dan BPO	60	70

## II. 4. Sasaran Strategis Perwakilan RI

6 (enam) Sasaran Strategis utama KBRI Tashkent yang hendak dicapai pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

### 1. Meningkatnya dukungan Uzbekistan dan Kyrgyzstan terhadap kedaulatan NKRI, kerja sama bilateral, dan isu-isu global.

**Meningkat**, adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya.

**Dukungan**, adalah sokongan/bantuan.

**Kedaulatan** adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah

**Kerja sama** adalah suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama

**Bilateral** adalah hubungan antara dua pihak

Sasaran strategis ini diukur melalui seberapa banyak rekomendasi dan prakarsa KBRI Tashkent yang ditindaklanjuti oleh *stakeholders* dari yang disampaikan disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019 yang nilainya sama, sebagaimana tabel di bawah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya dukungan Uzbekistan dan Kyrgyzstan terhadap kedaulatan NKRI, kerja sama bilateral, dan isu-isu global	Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif KBRI Tashkent yang ditindaklanjuti <i>Stakeholders</i>	80%	80%	80%	80%	80%

2. **Meningkatnya Peran KBRI Tashkent dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di Uzbekistan dan Kyrgyzstan.**

**Meningkat**, adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya.

**Peran**, adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

**Mendukung**, adalah menyokong atau membantu.

**Penguatan**, adalah meningkatkan keunggulan / tidak mudah goyah.

**Pengaruh**, adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yg ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang atau pembuat kebijakan dalam suatu entitas.

Sasaran strategis ini diukur melalui seberapa banyak realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019, sebagaimana tabel di bawah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peran KBRI Tashkent dalam mendukung penguatan pengaruh Indonesia di negara akreditasi yang meningkat	Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan	75%	75%	75%	75%	75%

3. **Meningkatnya Peran KBRI Tashkent dalam menciptakan nilai manfaat bagi ekonomi dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.**

**Meningkat**, adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya

**Peran**, adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif

**Menciptakan**, adalah membuat/mengadakan sesuatu yang baru.

**Nilai manfaat ekonomi**, adalah jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara.

**Kesejahteraan**, adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman.

Sasaran strategis ini diukur melalui persentase peningkatan *trade, tourism, and investment* disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019 sebagaimana tabel di bawah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Peran KBRI Tashkent dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.	Persentase peningkatan <i>trade</i>	5%	5%	5%	5%	5%

4. **Menguatnya peran diplomasi soft power yang dilakukan oleh KBRI Tashkent di Uzbekistan dan Kyrgyzstan**

**Menguat**, adalah meningkatkan keunggulan/tidak mudah goyah

**Diplomasi soft power**, adalah penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan negara-negara dan entitas internasional lain dengan menggunakan kemampuan untuk menarik perhatian dan bekerja sama, mengubah dan mempengaruhi opini publik dan sosial melalui berbagai saluran.

Sasaran strategis ini diukur melalui persentase publik di Uzbekistan dan Kyrgyzstan yang berpandangan positif terhadap Indonesia disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019 sebagaimana tabel di bawah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Menguatnya peran diplomasi <i>softpower</i> yang dilakukan oleh KBRI Tashkent di Uzbekistan dan Kyrgyzstan	Persentase publik di Uzbekistan dan Kyrgyzstan yang berpandangan positif terhadap Indonesia.	90%	90%	90%	90%	90%

5. **Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora di Uzbekistan dan Kyrgyzstan**

**Meningkat**, adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya.

**Pelayanan**, adalah tindakan, bantuan, persiapan, dan pengurusan dokumen dan perizinandalam hal kekonsuleran, keimigrasian, ketenagakerjaan, pendidikan dan perhubungan, dan lain-lain.

**Perlindungan**, adalah pertolongan, pembelaan, pendampingan, dan penyediaan bantuan hukum dan sosial dari Perwakilan RI di luar negeri bagi WNI dan BHI yang terkena kasus diluar negeri.

**WNI**, adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia.

**BHI**, adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan menurut peraturan perundangan Indonesia.

**Diaspora**, adalah warga negara Indonesia, keturunannya, dan orang yang memiliki darah Indonesia yang menetap di luar negeri.

Sasaran strategis ini diukur melalui persentase permasalahan WNI dan BHI di Uzbekistan dan Kyrgyzstan yang diselesaikan, serta persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran disertai dengan

target setiap tahun sampai dengan 2019. Persentase tersebut diperoleh dari komponen dengan pembobotan sebagaimana tabel di bawah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora di Uzbekistan dan Kyrgyzstan	Persentase permasalahan WNI dan BHI di Uzbekistan dan Kyrgyzstan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran	90%	90%	90%	90%	90%

#### 6. Meningkatkan penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel

**Meningkat**, adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya

**Dukungan**, adalah sokongan atau bantuan

**Manajemen**, adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

**Akuntabel**, adalah dapat dipertanggungjawabkan dan harus mencapai sasaran baik fisik maupun keuangan.

Sasaran strategis ini diukur melalui nilai hasil evaluasi AKIP KBRI Tashkent yang dilakukan oleh BPO dan Itjen dan persentase realisasi anggaran (SP2D) terhadap alokasi DIPA KBRI Tashkent disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019 sebagaimana tabel di bawah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Tashkent yang dilakukan Itjen dan BPO	60 (B)	63 (BB)	65 (BB)	67 (A)	70 (A)
	Persentase Realisasi Anggaran (SP2D) terhadap Alokasi DIPA KBRI Tashkent	96%	97%	97%	98%	98%

### **BAB III PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) KBRI Tashkent Tahun 2015-2019 merupakan dokumen yang disusun sebagai acuan bagi pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis KBRI Tashkent selama periode tersebut. Sebagai dasar dari Perencanaan Kinerja KBRI Tashkent, RENSTRA ini selanjutnya akan dituangkan dan dijabarkan ke dalam paket perencanaan kinerja tahunan yaitu Rencana Kinerja KBRI Tashkent untuk periode yang sama (5 tahun).

Penerapan RENSTRA di dalam rencana kerja akan diimplementasikan berdasarkan prioritas Tujuan dan Sasaran pada masing-masing tahun, dan diharapkan agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RENSTRA tersebut dapat dicapai semaksimal mungkin.

**Tashkent, Juni 2015**

**COPY KBRI TASHKENT**